



Sensasi Pulau Pribadi
Pelesir dengan kapal pesiar
ke pulau pribadi kini jadi
tren. Lamanya 3-7 hari saja.
INTERNASIONAL/HLM 4



KOMPAS.id
AMANAT HATI NURANI RAKYAT



PSG Dinanti
Status juara bertahan tidak
menguntungkan untuk
Paris Saint-Germain.
OLAHRAGA/HLM 14

SABTU, 30 AGUSTUS 2025

www.kompas.id



Harian Kompas



@hariankompas

APARAT

Polisi Tidak Kebal Hukum

Seragam dan lencana tidak membebaskan polisi dari hukuman jika terbukti menggunakan kekerasan yang mengakibatkan warga tewas. Meski dapat pembelaan dari kesatuanannya, di sejumlah negara, polisi tetap dihukum dengan beragam jenis sanksi.

Pengadilan Memphis di Negara Bagian Tennessee, Amerika Serikat, membuat keputusan yang melegakan keluarga Tyrol Nichols. Pada Kamis (28/8/2025) siang waktu setempat atau Jumat dini hari WIB, Hakim Sheryl H Lipman memerintahkan persidangan ulang terhadap tiga bekas polisi, yakni Tadarrius Bean, Demetrius Haley, dan Justin Smith. Perintah dikeluarkan hampir tiga bulan setelah ketiga polisi itu dibebaskan dalam kasus Nichols.

Nichols dihentikan polisi pada 7 Januari 2023 karena dicurigai mengemudi secara sembrono. Dalam laporan CNN disebutkan, pihak berwenang tidak dapat membuktikan alasan penghentian tersebut. Rekaman kejadian menunjukkan petugas berulang kali mengancam Nichols dengan kekerasan, bahkan ketika ia tampak mematuhi perintah mereka.

Setelah ditahan, Nichols dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan meninggal tiga hari kemudian. Pemeriksa medis memastikan ia meninggal karena trauma benda tumpul di kepala.

Kematian Nichols memicu protes nasional di AS terhadap kebrutalan polisi. Aksi itu membuat pihak berwenang memperkuat pengawasan terhadap polisi di Memphis. Investigasi Departemen Kehakiman menemukan bahwa Departemen Kepolisian Memphis terlibat dalam "penegakan hukum yang diskriminatif terhadap warga kulit hitam".

Lima petugas menghadapi tuntutan negara bagian dan federal terkait kematian Nichols. Namun, dua orang, yakni Desmond Mills Jr dan Emmitt Martin, mengaku bersalah dan akhirnya bersaksi melawan tiga petugas yang bersikukuh tidak bersalah.

Pada 7 Mei 2025, Bean, Haley, dan Smith dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan. Lewat keputusan Hakim Lipman, ketiga bekas polisi itu kembali harus disidang.

Negara lain

Polisi di negara lain juga dihukum jika menewaskan orang saat bertugas. Contohnya di Belanda dalam kematian Mitch Henriquez (42). Pria itu dibunuh polisi Belanda di sela festival musik di Den Haag pada 27 Juni 2015.

Ia ditahan oleh lima petugas polisi dan dicekik hingga tewas. Keterangan resmi bahwa Henriquez meninggal di rumah sakit langsung dibantah para saksi mata yang merekam insiden tersebut.

Pembunuhan itu menyebabkan kerusakan selama empat hari di Den Haag dan larangan berkumpul di tempat umum.

(Bersambung ke him 15 kol 1-2)

Kemerdekaan dari Kemiskinan Karakter

ANALISIS BUDAYA

IDI SUBANDY IBRAHIM
Peneliti Budaya, Media, dan
Komunikasi



Mohammad Hatta, salah seorang proklamator RI, adalah seorang pria yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk cita-cita bangsanya. Melalui hidup Waki Presiden pertama RI itu, di satu sisi, menggambarkan tekad, keberanian, dan optimisme. Di sisi lain, juga menggambarkan kekecewaan dan frustrasi yang dialami seorang pemimpin ketika cita-cita demokratisnya hancur dan negara yang dicintainya kembali ke jenis pemerintahan yang serupa dengan yang telah ia dedikasikan semuruh hidupnya untuk diubah.

(Bersambung ke him 15 kol 6-7)

Presiden Perintahkan Pengusutan Kematian Affan

Tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek, karena dilindas kendaraan taktis Brimob Polri, memicu unjuk rasa di sejumlah daerah. Presiden Prabowo minta kasus itu diusut tuntas.



Warga dan pengojek daring mengantar jenazah Affan Kurniawan menuju pemakaman di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob yang tengah membubarkan pengunjuk rasa pada Kamis (28/8) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah pada Jumat (29/8/2025), menyusul tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, karena dilindas kendaraan taktis Brimob Polri. Terkait kasus ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan terkejut dan kecewa dengan tindakan berlebihan aparat dan minta peristiwa tersebut diusut tuntas secara transparan.

"Sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan," kata Presiden melalui video rekaman yang disebar pada Jumat (29/8) siang.

Selain menyampaikan dukacita atas kematian Affan dan menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, dalam video tersebut Presiden juga memerintahkan kasus itu diusut tuntas. "Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya ditemukan mereka berbuat di luar keputusan dan ketentuan yang berlaku, kami akan ambil tindakan sekeras-kerasnya terhadap mereka yang melanggar," ujar

>> BACA JUGA:

Menakar Kelalaian Polisi dalam Insiden Tewasnya Affan

Insiden terbunuhnya pengemudi ojol, Affan Kurniawan, karena dilindas rantis polisi menjadi gambaran kepanikan aparat menanggapi demonstrasi. KOMPAS.ID

kompas.com/kelalaianpolisi

Prabowo

Pada Jumat malam, Presiden mendatangi rumah Affan di kawasan Menteng, Jakarta.

Affan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di daerah Pejompongan, Jakarta, Kamis malam. Sebelum peristiwa itu terjadi, pada siang harinya para buruh berunjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan. Jenazah Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak.

Terkait tewasnya Affan, tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan yang melindasnya ditahan selama 20 hari ke depan atau sampai 17

September 2025.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim mengatakan, dari tujuh anggota Brimob itu, dua orang duduk di depan, sementara lima orang lainnya di belakang.

"Yang mengemudi yaitu Bripta R, sedangkan yang duduk di belakang adalah lima orang, yaitu Aipda R, Bripta D, Bripta M, Bhuraka J, dan Bhuraka Y," tutur Abdul Karim.

Berdasarkan gelar perkara awal, menurut Abdul Karim, tujuh anggota Brimob itu telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Adapun untuk dugaan pidana, bukan ditangani Divpropam Polri. "Terhadap pelanggaran itu sudah sama kayak tersangka kalau di pengadilan pidana," ujarnya.

Unjuk rasa

Tewasnya Affan memicu unjuk rasa di sejumlah daerah, seperti Bandung, Semarang,

(Bersambung ke him 15 kol 1-5)

PEMAKAMAN

Antaran Terakhir Affan Kurniawan

**Atiek Ishlahiyah Al-Hamasy dan
Abdullah Filki Ashri**

Sak tangis keluarga almarhum Affan Kurniawan (23) pecah di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025). Di bawah terk matahari, jasad Affan, pengemudi ojek daring, dimakamkan. Affan meninggal akibat dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, dalam kerusuhan unjuk rasa, Kamis (28/8) malam. Affan pergi untuk selamanya saat mengantarkan pesanan pelanggan.

Susana pemakaman begitu pilu. Sang ibu, Erlina, terduduk lunglai di pinggir makam sembari menangis. Sesekali ia beringsut mendekati makam agar bisa melihat jasad putranya di liang lahad untuk terakhir kali.

Ayah Affan, Zulkifli, tak sanggup turun ke liang lahad. Begitu tanah merah mulai menimbun jenazah Affan, ia memberikan diri maju untuk menaburkan bunga.

Di sekitar makam, ratusan pelayat yang mayoritas adalah rekan sesama pengemudi ojek daring mengantar kepergian Affan. Mereka bernara lantang menuntut keadilan.

Affan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang memikul tanggung jawab besar di usia mudanya. Ayah dan ibunya bekerja serabutan. Kakaknya pun turut menjadi pengemudi ojek daring, sedangkan adik perempuannya masih duduk di bangku SMP. Dalam kondisi ekonomi yang sepi terbatas, Affan adalah tulang punggung keluarga karena dia telah membantu kami sebagai orangtua," ucap Zulkifli.

Selama bekerja sebagai pengemudi ojek daring, Affan telah membantu kami sebagai orangtua," ucap Zulkifli. Selama bekerja sebagai pengemudi ojek daring, Affan telah membantu kami sebagai orangtua," ucap Zulkifli.

Baca artikel lainnya seperti Opini di Kompas.id dengan memindai QR Code
Klik: kompas.id/opini

6 Opini

TAJUK RENCANA

Penanganan Unjuk Rasa

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi konstitusi. Aparat seharusnya mengamankannya sesuai prosedur yang menghormati HAM.

Oleh karena itu, kita menyesalkan elses dari penanganan unjuk rasa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada Kamis (28/8/2025) malam, seperti dilaporkan Harian Kompas (Kompas.id). Sebelumnya, sejak siang hari, sejumlah elemen massa berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD Serayan, Jakarta. Mereka mengangkat beragam isu, dari isu perburuan, protes atas tunjangan anggota DPR, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, hingga UU Perampasan Aset.

Unjuk rasa berlangsung hingga malam hari. Di tengah upaya penanganan unjuk rasa, sebuah kendaraan taldis (rantis) Polri melindas pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan (21), di kawasan Pejompong, Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga meninggal. Informasi ini cepat meluas dan menjadi perangkap di media sosial. Solidaritas pengemudi ojek daring bangkit. Simpati publik muncul melalui media sosial. Kita berdua atas meninggalnya Affan.

Pada era media sosial ini, kita menyadari efek amplifikasi dari siaran langsung media sosial, terutama TikTok, yang tidak dapat dihindarkan. Dengan keterbukaan informasi saat ini, tak ada lagi yang dapat disembunyikan dari publik. Komentar dan tindakan sekecil apa pun mendapatkan respons dari publik.

Dengan capaian informasi itu beredar, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri segera menangani masalah tersebut agar tidak meluas dampaknya. Permohonan maaf disampaikan, keluarga korban dijangkau, dan simpati diungkapkan. Dalam video rekaman, hari Jumat, Presiden Prabowo Subianto bahkan menjamin kehidupan keluarga Affan Kurniawan.

Presiden juga menyatakan terkejut dan kecewa atas tindakan berlebihan aparat. Peristiwa tersebut akan diutus tuntas secara transparan. Tujuh polisi yang terlibat diproses oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Publik menanti apa hasil pemeriksaan internalnya, prosedur apa yang dilanggar dalam penanganan unjuk rasa tersebut, dan apa sanksinya.

Sementara menanti hasil pemeriksaan tersebut, semua pihak diharapkan menahan diri agar unjuk rasa berlangsung tertib sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diartikulasikan dengan baik dan mendapat respons seperti yang diharapkan. Terlebih Presiden Prabowo berjanji meniadakan jeri kelan masyarakat.

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin hak warga negara mengemukakan pendapatnya dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Namun, UU No 9/1998 juga mengatur kewajiban aparat memvonis unjuk rasa sesuai prosedur yang menghormati hak asasi manusia (HAM).

Lebih dari itu, alar masalah yang menyebabkan unjuk rasa terjadi juga menjadi catatan bagi elite politik. Para elite politik diharapkan dapat mencontohkan gaya hidup dan komunikasi yang berempati dengan sebagian warga yang sedang bergulat dengan kesulitan ekonomi.

Aspek Diplomasi Latihan Gabungan

Pada minggu keempat bulan ini, secara terpisah kawasan Asia-Pasifik menjadi tuan rumah dua latihan militer gabungan antarnegara.

Yang pertama adalah latihan militer gabungan Super Garuda Shield yang digelar di Indonesia, dan kedua adalah Exercise Alon yang berlangsung di sekitar Beting Scarborough. Meskipun digelar di dua tempat berbeda, kedua latihan tersebut memiliki tujuan yang lebih kurang sama, yaitu membangun interoperabilitas, memperkuat kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dan menjaga stabilitas di kawasan.

Ketiga tujuan tersebut melengkapi tujuan dari sejumlah latihan militer gabungan lain yang digelar sebelumnya. Latihan gabungan itu, antara lain, dilakukakan oleh Amerika Serikat-Filipina atau Filipina-Jepang dengan misi menjaga kebebasan navigasi di wilayah Laut China Selatan.

Di sisi lain, ada pula latihan militer yang digelar secara mandiri, salah satunya oleh China. Pada Mei 2024, Beijing menggelar latihan militer antarmatra bertajuk Pedang Gabungan-2024A. Latihan tersebut menyimulasikan saat China memblokir Taiwan. Oleh sejumlah pihak, model latihan ini cenderung dilihat sebagai bentuk proyeksi kekuatan daripada cendrung dilihat sebagai bentuk kerja sama di kawasan.

Joni dan Poni



Ojek "Online", Demo DPR, dan Luka Demokrasi

Bernardus Agus Ruliyanto
Dosen Universitas Sarata Dharma

Peristiwa tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, di tengah unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025, membuka luka lama bangsa ini.

Demokrasi di Indonesia masih sering diwarnai kekerasan dan ketidakadilan. Kejadian tragis itu bukan sekadar statistik korban dalam aksi massa, melainkan kisah nyata seorang warga kecil pencari nafkah, tetapi justru menjadi korban dalam pusaran konflik antara rakyat dan penguasa.

Insiden ini bukan hanya soal satu nyawa melayang, melainkan menyimpan makna simbolis tentang rapuhnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), lemahnya etika politik dalam penanganan aspirasi rakyat, dan krisis moral yang tengah kita hadapi sebagai bangsa. Pertanyaan mendasar, sampai kapan kekerasan menjadi jawaban terhadap suara rakyat yang turun ke jalan?

Insiden ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak boleh dijadikan alat atau korban dari kekerasan politik. Inma-

nuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) menekankan prinsip kategoris imperatif: "Bertin-daklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun orang lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah semata-mata sebagai alat." Tra-gedi ojol ini justru memperlihatkan ba-gaimana rakyat kecil sering terjebak sebagai "alat" dalam konflik kepentingan politik, bukan diperlakukan sebagai tu-juan yang bermartabat.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) juga menegaskan pentingnya ke-adilan sebagai *fairness*, ketika distribusi beban sosial harus mempertimbangkan mereka yang paling lemah. Seorang pe-kerja ojol yang meninggal karena situasi politik jelas merupakan bentuk ketidak-adilan struktural: ia yang paling rentan justru menanggung akibat dari perta-rungan yang bukan bagian dari kepen-tingannya.

Kekerasan negara

Secara politis, insiden ini menunjuk-kan adanya krisis representasi. Demon-strasi di depan DPR lahir dari ketidak-puasan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Alih-alih mendengar aspirasi, negara justru menampikan wajah represif yang memakan korban jiwa.

Hannah Arendt dalam *On Violence* (1970) membedakan antara kekuasaan

dan kekerasan. Kekuasaan yang sah lahir dari konsensus rakyat, sementara keke-rasan muncul ketika kekuasaan kehi-langan legitimasi. Tragedi ini adalah contoh nyata negara yang seharusnya hadir dengan keluasan demokratis ju-stu menampikan kekerasan. Hal itu hanya memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif atau-pun eksekutif.

Kematian seorang pengemudi ojol ju-ga menyentah nurani kolektif bangsa. Rakyat kecil yang sehari-hari menjadi penopang kehidupan urban, menaggar-kan makanan, mengubungkan mobi-litas, ternyata begitu mudah ditipiskan ketika mereka menjadi korban. Solida-ritas sosial yang seharusnya menjadi dasar kebangsaan tampak rapuh.

Ermannuel Levinas menegaskan bahwa wajah orang lain selalu menuntut tang-gung jawab etis (1961). Wajah seorang pengemudi ojol yang tewas di tengah jal-an raya semestinya menenggul bangsa ini untuk berhenti sejenak apakah kita sudah benar-benar menghadirkan keadilan bagi yang kecil dan rentan?

Demokrasi yang humanis

Insiden ini menegaskan urgensi pe-rubahan mendasar. Ada beberapa lan-gkah yang perlu ditempuh. Pertama, in-vestigasi independen harus segera dilak-ukan oleh lembaga HAM nasional de-ngan melibatkan masyarakat sipil, bu-kan hanya aparat negara.

Kedua, pertanggungjawaban moral DPR wakil rakyat tidak boleh sekadar berunding pada imunitas politik, tetapi harus hadir menjawab duka rakyat. Ke-tiga, reformasi cara negara menghadapi demonstrasi aparat harus dilatih untuk pendekatan persuasif, bukan represif. Kekerasan hanya akan memperlebar ju-rang antara negara dan rakyat.

Keempat, perlindungan pekerja infor-masi-pengemudi ojol dan pekerja serupa harus diakui sebagai bagian dari sistem kerja nasional yang berhak mendapat perlindungan hukum, sosial, dan kese-hatan. Kelima, pendidikan etika politik demokrasi Indonesia tidak akan sehat jika para pemimpin hanya berpikir prag-matis. Bung Hatta menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan juga "keadulatan rakyat yang berkeadilan sosial".

Insiden ini adalah cermin retaknya etika politik dan moral sosial bangsa. Demokrasi yang seharusnya melindungi justru melukai. Negara yang seharusnya mengayomi justru mencedera.

Martabat manusia harus ditempatkan di atas kepentingan politik, keadilan harus berpihak pada yang paling lemah, kekuasaan harus lahir dari konsensus bukan kekerasan. Indonesia tidak boleh meniarikan rakyat kecil menjadi kor-ban. Demokrasi yang hidup adalah yang manusiawi, berpihak pada yang lemah, dan menolak segala kekerasan yang mencedera martabat manusia.

Akhir Polemik Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Emerson Yuntho
Wakil Direktur Visi Integritas

Ojek "Online", Demo DPR, dan Luka Demokrasi

Bernardus Agus Rukiyanto
Dosen Universitas Sanata Dharma

Peristiwa tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, di tengah unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025, membuka luka lama bangsa ini.

Demokrasi di Indonesia masih sering diwarnai kekerasan dan ketidakadilan. Kejadian tragis itu bukan sekadar statistik korban dalam aksi massa, melainkan kisah nyata seorang warga kecil pencari nafkah, tetapi justru menjadi korban dalam pusaran konflik antara rakyat dan penguasa.

Insiden ini bukan hanya soal satu nyawa melayang, melainkan menyimpan makna simbolis tentang rapuhnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), lemahnya etika politik dalam penanganan aspirasi rakyat, dan krisis moral yang tengah kita hadapi sebagai bangsa. Pertanyaan mendasar, sampai kapan kekerasan menjadi jawaban terhadap suara rakyat yang turun ke jalan?

Insiden ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak boleh dijadikan alat atau korban dari kekerasan politik. Imma-

nuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) menekankan prinsip kategoris imperatif: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun orang lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah semata-mata sebagai alat." Tragedi ojol ini justru memperlihatkan bagaimana rakyat kecil sering terjebak sebagai "alat" dalam konflik kepentingan politik, bukan diperlakukan sebagai tujuan yang bermartabat.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) juga menegaskan pentingnya keadilan sebagai *fairness*, ketika distribusi beban sosial harus mempertimbangkan mereka yang paling lemah. Seorang pekerja ojol yang meninggal karena situasi politik jelas merupakan bentuk ketidakadilan struktural: ia yang paling rentan justru menanggung akibat dari pertanggung jawaban yang bukan bagian dari kepeentingannya.

Kekerasan negara

Secara politis, insiden ini menunjukkan adanya krisis representasi. Demonstrasi di depan DPR lahir dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Alih-alih mendengar aspirasi, negara justru menampilkan wajah represif yang memakan korban jiwa.

Hannah Arendt dalam *On Violence* (1970) membedakan antara kekuasaan

dan kekerasan. Kekuasaan yang sah lahir dari konsensus rakyat, sementara kekerasan muncul ketika kekuasaan kehilangan legitimasi. Tragedi ini adalah contoh nyata: negara yang seharusnya hadir dengan kekuasaan demokratis justru menampilkan kekerasan. Hal itu hanya memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif ataupun eksekutif.

Kematian seorang pengemudi ojol juga menyentuh nurani kolektif bangsa. Rakyat kecil yang sehari-hari menjadi penopang kehidupan urban, mengantarkan makanan, menghubungkan mobilitas, ternyata begitu mudah dilupakan ketika mereka menjadi korban. Solidaritas sosial yang seharusnya menjadi dasar kebangsaan tampak rapuh.

Emmanuel Levinas menegaskan bahwa wajah orang lain selalu menuntut tanggung jawab etis (1961). Wajah seorang pengemudi ojol yang tewas di tengah jalan raya semestinya memanggil bangsa ini untuk berhenti sejenak: apakah kita sudah benar-benar menghadirkan keadilan bagi yang kecil dan rentan?

Demokrasi yang humanis

Insiden ini menegaskan urgensi perubahan mendasar. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh. Pertama, investigasi independen harus segera dilakukan oleh lembaga HAM nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya aparat negara.

Kedua, pertanggungjawaban moral DPR: wakil rakyat tidak boleh sekadar berlindung pada imunitas politik, tetapi harus hadir menjawab duka rakyat. Ketiga, reformasi cara negara menghadapi demonstrasi: aparat harus dilatih untuk pendekatan persuasif, bukan represif. Kekerasan hanya akan memperlebar jurang antara negara dan rakyat.

Keempat, perlindungan pekerja informal: pengemudi ojol dan pekerja serupa harus diakui sebagai bagian dari sistem kerja nasional yang berhak mendapat perlindungan hukum, sosial, dan kesehatan. Kelima, pendidikan etika politik: demokrasi Indonesia tidak akan sehat jika para pemimpin hanya berpikir pragmatis. Bung Hatta menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan juga "kedaulatan rakyat yang berkeadilan sosial".

Insiden ini adalah cermin retaknya etika politik dan moral sosial bangsa. Demokrasi yang seharusnya melindungi justru melukai. Negara yang seharusnya mengayomi justru mencederai.

Martabat manusia harus ditempatkan di atas kepentingan politik, keadilan harus berpihak pada yang paling lemah, kekuasaan harus lahir dari konsensus bukan kekerasan. Indonesia tidak boleh membiarkan rakyat kecil menjadi korban. Demokrasi yang hidup adalah yang manusiawi, berpihak pada yang lemah, dan menolak segala kekerasan yang mencederai martabat manusia.